



# The Effect of Implementation of Government Accounting Standards and Internal Control System on The Quality of Financial Statements of Disdukcatpil District Langkat

**Ahmad Fadli**

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [ahmadfadly26052000@gmail.com](mailto:ahmadfadly26052000@gmail.com)

**Juliana Nasution**

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [juliananasution@uinsu.ac.id](mailto:juliananasution@uinsu.ac.id)

## Keywords:

Accounting,  
Financial  
Statements,  
Internal  
Control,  
Government

## Abstract

*In the context of accountability, it is necessary to implement an appropriate, clear and measurable financial reporting system in accordance with the principles of transparency and accountability. With the financial reports, both central and regional finances are expected to be managed properly in order to manage public funds in a transparent, economical, efficient, effective and accountable manner. The existence of these financial statements needs to be considered further, the usefulness of the report as a mere obligation without using the financial statements as a source of information to determine and take policies in developing and growing the region. This study uses a method, namely a quantitative approach. This research begins with observations as preparation for the final stage, namely reporting the results of the study. The research time starts from January 17, 2022 until it is finished. This research was conducted directly on the company. The type of data used is Primary data. Primary data is taken from direct observation and then conducting interviews with related parties. The data used are data from interviews. The selected population are employees of DISDUKCATPIL. The results of this study are the effect that occurs between the Government Accounting System and the Financial Statement Quality variable is not statistically significant at the 5% significance level. The effect that occurs between the Government Internal Control System and the Financial Statement Quality variable is statistically significant at the 5% significance level. The Government Accounting System and the Government Internal Control System simultaneously or simultaneously affect the Financial Report Quality variable at a significance level of 5%.*

## Kata Kunci

Akuntansi,  
Laporan,  
Keuangan,  
Pengendalian  
Internal,  
Pemerintah

## Abstrak

Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya laporan keuangan, baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai suatu kewajiban belaka tanpa menjadikan keuangan itu sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode yaitu pendekatan kuantitatif. Penelitian ini diawali dengan pengamatan sebagai persiapan ke tahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Waktu penelitian dimulai dari 17 Januari 2022 hingga selesai. Penelitian ini dilakukan secara langsung pada perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data Primer. Data Primer diambil dari melakukan observasi langsung dan kemudian melakukan wawancara kepada pihak terkait. Data-data yang digunakan yaitu data dari hasil wawancara. Populasi yang dipilih adalah pegawai dari DISDUKCATPIL. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh yang terjadi antara Sistem Akuntansi Pemerintah dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Pengaruh yang terjadi antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara bersamaan atau simultan mempengaruhi variabel Kualitas Laporan Keuangan pada tingkat signifikansi 5%.

## 1. PENDAHULUAN

Dengan adanya laporan keuangan, baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut perlu

dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai suatu kewajiban belaka tanpa menjadikan keuangan itu sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan



akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Pada tahun 2005 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar laporan keuangan lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan (Pohan, 2008).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Sulhan dan Elly Siswanto, 2008).

Hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Semester I Tahun 2013 menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan entitas pemerintah pusat/daerah dibanding Semester

I Tahun 2012. Perbaikan opini tersebut antara lain disebabkan entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya entitas yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kecenderungan menurunnya jumlah entitas yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini WTP juga meningkat dari 67 menjadi 113.

Disamping peningkatan kualitas laporan keuangan pada tahun 2013, BPK juga mencatat kasus-kasus yang sering terjadi dari tahun ke tahun dan memiliki nilai yang relatif besar. Kasus-kasus tersebut antara lain adalah kekurangan penerimaan, baik yang berasal dari penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah maupun denda keterlambatan pekerjaan. Selain itu, BPK juga menemukan kasus seperti pengelolaan aset yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan kelemahan yang terdapat dalam sistem pengendalian intern. Dari hasil pemeriksaan keuangan yang dilaporkan dalam Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2013, BPK telah memeriksa 415 LKPD Tahun 2012 dari 529 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota. Cakupan pemeriksaan keuangan tersebut meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran (LRA) atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas (LAK).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya standar ini maka



laporan keuangan harus didasarkan pada standar ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan (Harmono, 2009).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
- b. Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal
- c. Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akruwal
- d. Lampiran III Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (Siregar, 2020).

Penyusunan SAP Berbasis Akruwal dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan. Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III. Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar

penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## 2.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian Intern didefinisikan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Emka, 2006).

Di lihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pengendalian intern akuntansi. Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntan. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.
- b. Pengendalian administratif. Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu.

## 2.3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan



transaksi - transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Muhammad, 2016).

Laporan Keuangan merupakan laporan yang menunjukkan semua aktifitas operasi atau transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan keuangandalam suatu periode tertentu. Laporan Keuangan yang disajikan harus menyangkut semua informasi yang terjadi dalam Pemerintah Daerah tersebut sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif dari pihak luar dan laporan keuangan yang disajikan tersebut relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dimengerti untuk tujuan pengambilan keputusan. Dalam Brigham dan Huoston (2010) "Laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis di atasnya, tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang berada di balik angka tersebut." Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) "Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang digunakan untuk menganalisa kekuatan dan seberapa besar kondisi finansial perusahaan yang berguna untuk mengevaluasi keadaan finansial pada masa lalu, sekarang, dan memproyeksikan hasil yang akan datang".

Pada umumnya pengertian Akuntansi antara Pemerintahan dan Pihak Swasta adalah sama, yaitu sama-sama melakukan kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi. Namun, yang membedakannya adalah harus diperhatikannya penekanan dalam hal siapa yang mengelola sumber dananya dan darimana sumber dana tersebut apakah dari perseorangan atau entitas pelaporan lain atau organisasi lain.

Akuntansi Pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan. Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu sistem informasi pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, mengikhtisarkan, dan mengkomunikasikan kegiatan suatu daerah berupa pelaporan untuk pengambilan keputusan (Soemitra, 2017).

#### **2.4. Basis Akuntansi**

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Menurut KSAP PP No. 24 Tahun 2005, bahwa : Basis akuntansi ada 2 (dua), yaitu (Murhadi, 2013):

##### **a. Basis Kas**

Basis Kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain Akuntansi Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan.

##### **b. Basis Akrual**

Akrual Teknik Basis Akrual memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi basis akrual adalah basis



akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual adalah : Suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

### 3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini diawali dengan pengamatan sebagai persiapan ke tahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Waktu penelitian dimulai dari 17 Januari 2022 hingga selesai. Penelitian ini dilakukan secara langsung pada Bank Jenis data yang digunakan adalah data Primer. Data Primer diambil dari melakukan observasi langsung dan kemudian melakukan wawancara kepada pihak terkait. Data-data yang digunakan yaitu data dari hasil wawancara. Populasi yang dipilih adalah pegawai dari DISDUKATPIL. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Variabel Terikat (*Dependent Variable*) adalah hasil kuesioner yang dilaksanakan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah digunakan adalah data Primer dari hasil kuesioner dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data statistik deskriptif. Yang termasuk dalam teknik analisa data statistik deskriptif diantaranya seperti penyajian data

kedalam bentuk grafik, tabel, presentase, frekwensi, diagram, grafik, mean, modus, dll. Sedangkan Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Skala pengukuran data yaitu rasio. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini maka perlu adanya beberapa uji yang dilakukan, yaitu: 1. Analisis Statistik Deskriptif, 2. Uji Asumsi Klasik, 3. Analisis Regresi Linear Berganda, 4. Uji Hipotesis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Analisis Deskriptif

Berdasarkan Tabel A pada Lampiran 2, diketahui untuk variabel Sistem Akuntansi Pemerintah ( $X_{11}$ ) terdapat 10 pertanyaan. Mayoritas responden menjawab setuju (S) untuk tiap-tiap butir pertanyaan. Berdasarkan Tabel B pada Lampiran 2, untuk variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_{12}$ ) terdapat 10 pertanyaan. Diketahui mayoritas responden menjawab setuju (S) untuk tiap-tiap butir pertanyaan. Berdasarkan Tabel C pada Lampiran 2, untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan ( $X_{13}$ ) terdapat 12 pertanyaan. Diketahui mayoritas responden menjawab setuju (S) untuk tiap-tiap butir pertanyaan.

#### 4.1.2. Uji Kualitas Data

##### 4.1.2.1. Uji Validitas

Noor (2011) menyatakan agar diperoleh distribusi nilai hasil pengukuran mendekati normal, maka sebaiknya jumlah responden untuk uji coba kuesioner paling sedikit 30 orang. Dalam penelitian ini, uji coba kuesioner melibatkan 30 responden. Berikut hasil dari uji validitas terhadap butir-butir pertanyaan dari variabel Sistem Akuntansi Pemerintah ( $XX_1$ ), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $XX_2$ ) dan Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ).



**Tabel 4.1**

**Uji Validitas Pertanyaan-Pertanyaan pada Kuesioner Sistem Akuntansi Pemerintah (XX<sub>11</sub>)**

Korelasi antara	Nilai r hitung	Nilai r valid	Valid jika r hitung > r valid
Pertanyaan 1 dengan total	0,607	0,3	Valid
Pertanyaan 2 dengan total	0,687	0,3	Valid
Pertanyaan 3 dengan total	0,602	0,3	Valid
Pertanyaan 4 dengan total	0,720	0,3	Valid
Pertanyaan 5 dengan total	0,789	0,3	Valid
Pertanyaan 6 dengan total	0,601	0,3	Valid
Pertanyaan 7 dengan total	0,582	0,3	Valid
Pertanyaan 8 dengan total	0,690	0,3	Valid
Pertanyaan 9 dengan total	0,705	0,3	Valid
Pertanyaan 10 dengan total	0,759	0,3	Valid

**Tabel 4.2**

**Uji Validitas Pertanyaan-Pertanyaan pada Kuesioner Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (XX<sub>22</sub>)**

Korelasi antara	Nilai r hitung	Nilai r valid	Valid jika r hitung > r valid
Pertanyaan 1 dengan total	0,548	0,3	Valid
Pertanyaan 2 dengan total	0,438	0,3	Valid
Pertanyaan 3 dengan total	0,767	0,3	Valid
Pertanyaan 4 dengan total	0,796	0,3	Valid
Pertanyaan 5 dengan total	0,754	0,3	Valid
Pertanyaan 6 dengan total	0,796	0,3	Valid
Pertanyaan 7 dengan total	0,659	0,3	Valid
Pertanyaan 8 dengan total	0,687	0,3	Valid
Pertanyaan 9 dengan total	0,675	0,3	Valid
Pertanyaan 10 dengan total	0,828	0,3	Valid

**Tabel 4.3**

**Uji Validitas Pertanyaan-Pertanyaan pada Kuesioner Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

Korelasi antara	Nilai r hitung	Nilai r valid	Valid jika r hitung > r valid
Pertanyaan 1 dengan total	0,536	0,3	Valid
Pertanyaan 2 dengan total	0,685	0,3	Valid
Pertanyaan 3 dengan total	0,700	0,3	Valid
Pertanyaan 4 dengan total	0,718	0,3	Valid
Pertanyaan 5 dengan total	0,584	0,3	Valid
Pertanyaan 6 dengan total	0,524	0,3	Valid
Pertanyaan 7 dengan total	0,805	0,3	Valid
Pertanyaan 8 dengan total	0,721	0,3	Valid
Pertanyaan 9 dengan total	0,667	0,3	Valid
Pertanyaan 10 dengan total	0,693	0,3	Valid
Pertanyaan 11 dengan total	0,737	0,3	Valid
Pertanyaan 12 dengan total	0,785	0,3	Valid



Nilai patokan untuk uji validitas adalah koefisien korelasi yang mendapat nilai lebih besar dari 0,3. Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.1 hingga 4.3 terhadap pertanyaan-pertanyaan pada variabel Sistem Akuntansi Pemerintah ( $XX_1$ ), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $XX_2$ ) dan Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ), diketahui seluruh pertanyaan bersifat valid.

#### 4.1.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas harus dilakukan hanya pada pertanyaan yang telah memiliki atau memenuhi uji validitas, jadi jika tidak memenuhi syarat uji validitas maka tidak perlu diteruskan untuk uji reliabilitas (Noor, 2011). Berikut hasil dari uji reliabilitas terhadap butir-butir pertanyaan yang valid.

**Tabel 4.4**  
**Uji Reliabilitas pada Kuesioner Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah ( $XX_{11}$ ), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $XX_{22}$ ) dan Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ )**

Variabel	Nilai Alpha Cronbach	Nilai Kritis	Keterangan	Kesimpulan
Sistem Akuntansi Pemerintah	0,863	0,6	0,863 > 0,6	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,872	0,6	0,872 > 0,6	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,891	0,6	0,891 > 0,6	Reliabel

Jika nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6, maka kuesioner penelitian bersifat reliabel. Diketahui bahwa kuesioner dari variabel Sistem Akuntansi Pemerintah ( $XX_1$ ), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $XX_2$ ) dan Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ) bersifat reliabel, karena nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6.

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan  $\alpha = 0,05$ . Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas  $\alpha$ , dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai probabilitas  $\alpha \geq 0,05$ , maka asumsi normalitas terpenuhi. Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

#### 4.1.3. Uji Asumsi Klasik

##### 4.1.3.1. Uji Normalitas

**Tabel 4.5**  
**Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
N	30
Kolmogorov-Smirnov Z	.780
Asymp. Sig. (2-tailed)	.577
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	

**Sumber :** hasil olahan *software* SPSS



Perhatikan bahwa berdasarkan Tabel 4.5, diketahui nilai probabilitas  $p$  atau *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,557. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah  $\alpha = 0,05$ . Karena nilai probabilitas  $p$ , yakni 0,557, lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi. Pengujian asumsi normalitas dapat juga digunakan pendekatan analisis grafik, seperti *normal probability plot* dan histogram. Pada pendekatan *normal probability plot*, jika titik-titik (*dots*) menyebar jauh (menyebar berliku-liku pada garis diagonal seperti ular) dari garis diagonal, maka diindikasikan asumsi normalitas *error* tidak dipenuhi. Jika titik-titik menyebar sangat dekat pada garis diagonal, maka asumsi normalitas dipenuhi. Sedangkan untuk

pendekatan histogram, jika kurva berbentuk kurva normal, maka asumsi normalitas dipenuhi. merupakan *output* dari SPSS. Perhatikan bahwa kurva pada histogram berbentuk kurva normal, sehingga disimpulkan bahwa asumsi normalitas *error* dipenuhi. Di samping itu pada *normal probability plot* (Gambar 4.1), titik-titik menyebar cukup dekat pada garis diagonal, maka disimpulkan bahwa asumsi normalitas dipenuhi.

#### 4.1.3.2. Uji Multikolinearitas

Untuk memeriksa apakah terjadi multikolinearitas atau tidak dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai VIF yang lebih dari 10 diindikasikan suatu variabel bebas terjadi multikolinearitas.

**Tabel 4.6**  
**Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sistem Akuntansi Pemerintah	.342	2.925
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.342	2.925

Sumber: hasil olahan *software* SPSS

Perhatikan bahwa berdasarkan Tabel 3.6, nilai VIF dari variabel Sistem Akuntansi Pemerintah ( $\beta_1$ ) adalah 2,925 dan nilai VIF dari variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah 2,925. Karena masing-masing nilai VIF tidak lebih besar dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas yang berat.

#### 4.1.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID pada sumbu Y, dan ZPRED pada sumbu X. Ghozali (2011) menyatakan dasar analisis

adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebarkan di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Perhatikan bahwa berdasarkan Gambar 3.3, tidak terdapat pola yang begitu jelas, serta titik-titik menyebarkan di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



#### 4.1.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut hasil perhitungan berdasarkan

penggunaan *software* SPSS, untuk analisis regresi linear beranda.

**Tabel 4.7**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.150	7.017		.164	.871
Sistem Akuntansi Pemerintah	.475	.294	.320	1.619	.117
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.710	.271	.518	2.620	.014

Sumber: hasil olahan *software* SPSS

Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut berikut.

$$Y = 1,150 + 0,475SAP + 0,710SPIP + e$$

Berdasarkan Tabel 4.7, diketahui nilai koefisien regresi dari Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 0,475. Diketahui nilai koefisien regresi SAP bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara SAP dan Kualitas laporan keuangan bersifat positif. Hal ini berarti terdapat kecenderungan, ketika SAP semakin baik, maka Kualitas Laporan Keuangan juga semakin baik. Berdasarkan Tabel 3.7, diketahui nilai koefisien regresi dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah 0,710. Diketahui nilai koefisien regresi SPIP bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara SPIP dan Kualitas laporan keuangan bersifat positif. Hal ini berarti terdapat kecenderungan, ketika SPIP semakin baik, maka Kualitas Laporan Keuangan juga semakin baik.

#### 4.1.5. Uji Hipotesis

Pada pengujian hipotesis, akan dilakukan koefisien determinasi, pengujian signifikansi koefisien regresi parsial secara menyeluruh atau simultan (uji  $F$ ), dan uji signifikansi koefisien regresi parsial secara individu (uji  $t$ ).

##### 4.1.5.1. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel tak bebas. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan variabel-variabel tak bebas secara simultan dalam menerangkan variasi variabel tak bebas amat terbatas. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  yang mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel tak bebas.



**Tabel 4.8 Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted RSquare
1	.800 <sup>a</sup>	.639	.613

**Sumber:** hasil olahan *software* SPSS

Berdasarkan Tabel 4.8, nilai koefisien determinasi  $R^2$  terletak pada kolom *R-Square*. Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar  $R^2 = 0,639$ . Nilai tersebut berarti seluruh variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ) sebesar 63,9%, sisanya sebesar 36,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

#### 4.1.5.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi koefisien regresi parsial secara menyeluruh merupakan suatu uji untuk menguji apakah seluruh variabel bebas secara

bersamaan atau simultan mempengaruhi variabel Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ). Hipotesis nol menyatakan seluruh variabel bebas secara bersamaan atau simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan paling tidak terdapat satu variabel bebas yang pengaruhnya signifikan secara statistik terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan lampiran 7 F Tabel, diketahui nilai F tabel adalah 3,35.

**Tabel 4.9**

#### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

##### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	609.674	2	304.837	23.938	.000 <sup>a</sup>
	Residual	343.826	27	12.734		
	Total	953.500	29			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Pemerintah

Kualitas Laporan Keuangan berdasarkan Tabel 3.9, diketahui nilai F hitung adalah 23,938. Perhatikan bahwa karena nilai F hitung  $\geq$  F tabel, maka disimpulkan bahwa pengaruh simultan variabel bebas Sistem Akuntansi Pemerintah ( $XX_1$ ) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $XX_2$ ) terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ) signifikan secara statistic.

#### 4.2. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, diketahui nilai F hitung 23,938 dan F tabel 3,354. Perhatikan bahwa karena nilai F hitung  $\geq$  F tabel, maka disimpulkan bahwa pengaruh simultan variabel bebas Sistem Akuntansi Pemerintah ( $XX_1$ ) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $XX_2$ ) terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ) signifikan secara statistik. Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar  $R^2 = 0,639$ . Nilai tersebut berarti seluruh variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel Kualitas



Laporan Keuangan ( $\beta$ ) sebesar 63,9%, sisanya sebesar 36,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Untuk pengujian secara parsial, diketahui nilai probabilitas atau *Sig.* dari variabel Sistem Akuntansi Pemerintah adalah 0,117. Karena nilai probabilitas Sistem Akuntansi Pemerintah, yakni 0,117, lebih besar dari tingkat signifikansi, yakni 0,05, maka disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara Sistem Akuntansi Pemerintah dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan tidak signifikan secara statistik. Perhatikan juga bahwa nilai  $t_{hitung} < |t_{tabel}|$ , yakni  $|1,619| > |2,05183|$ . Hasil dengan pendekatan probabilitas sama dengan hasil berdasarkan uji  $\beta$ . diketahui nilai koefisien regresi dari Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 0,475. Diketahui nilai koefisien regresi SAP bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara SAP dan Kualitas laporan keuangan bersifat positif. Hal ini berarti terdapat kecenderungan, ketika SAP semakin baik, maka Kualitas Laporan Keuangan juga semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purwaniati (2008), yakni SAP berpengaruh positif, namun dalam penelitian ini pengaruh positif SAP tidak signifikan.

Selain itu, diketahui nilai probabilitas atau *Sig.* dari variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah 0,014. Karena nilai probabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yakni 0,014, lebih kecil dari tingkat signifikansi, yakni 0,05, maka disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan signifikan secara statistik. Perhatikan juga bahwa nilai  $t_{hitung} > |t_{tabel}|$ , yakni  $|2,620| > |2,05183|$ . Hasil dengan pendekatan probabilitas sama dengan hasil berdasarkan uji *t*. diketahui nilai koefisien regresi dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah 0,710. Diketahui

nilai koefisien regresi SPIP bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara SPIP dan Kualitas laporan keuangan bersifat positif. Hal ini berarti terdapat kecenderungan, ketika SPIP semakin baik, maka Kualitas Laporan Keuangan juga semakin baik.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa informasi sebagai berikut.

1. Pengaruh yang terjadi antara Sistem Akuntansi Pemerintah dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%.
2. Pengaruh yang terjadi antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%.
3. Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara bersamaan atau simultan mempengaruhi variabel Kualitas Laporan Keuangan pada tingkat signifikansi 5%.

### 5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Bagi peneliti berikutnya disarankan menambah variabel lain yang berkaitan erat secara teori terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar variasi naik turunnya Kualitas Laporan Keuangan dapat lebih dijelaskan.
2. Bagi DISDUKCATPIL Langkat, diharapkan agar memperhatikan aspek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih ekstra dikarenakan aspek tersebut memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada tingkat signifikansi 5%.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, A., & Marsuni, N. S. (2019). Causality Relationship of Poverty, Unemployment Rate, and Economic Growth in South Sulawesi Province. *Jurnal Ekonomi Balance*, 15(2), 231-241.
- Emka, B. (2006). *Auditing Pedoman Pemeriksaan Akuntansi*. STIE Inaba.
- Harmono. (2009). *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus dan Riset Bisnis*. Bumi Aksara.
- Marsuni, N. S. (2019). PENGARUH PRAKTIK ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (I-CSR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2014-2018.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP STIM YKPN.
- Marsuni, N. S., & Ahmar, A. A. (2018). ANALYSIS OF INCOME LEVEL OF COCOA FARMERS IN SUPPORTING REGIONAL DEVELOPMENT IN IWOIMENDAA DISTRICT, KOLAKA REGENCY, SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE. *Jurnal Ekonomi Balance*, 14(2), 247-252
- Murhadi, W. R. (2013). *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham*. Salemba Empat.
- Pohan, A. (2008). *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Y. P. (2020). *KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LANGKAT*. Universitas Sumatera Utara.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Sulhan dan Elly Siswanto. (2008). *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. UIN Malang Press..